

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN TERHADAP
TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA PIHAK
(Studi kasus di PT ASTRA SEDAYA FINANCE di Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata I pada
jurusan ilmu hukum, fakultas hukum**

Oleh:

YANUAR KURNIA ADI

C.100.140.081

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB
HUKUM PARA PIHAK**

(Studi kasus di PT ASTRA SEDAYA FINANCE di Surakarta)

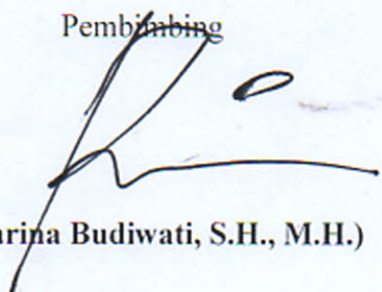
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

YANUAR KURNIA ADI
C100.140.081

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB
HUKUM PARA PIHAK
(Studi kasus di PT ASTRA SEDAYA FINANCE di Surakarta)

oleh:

YANUAR KURNIA ADI
C100 140 081

Telah diterima dan disahkan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari senin, 4 Febuari 2019
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Septarina Budiwati S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

Inayah S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Februari 2019
Penulis



YANUAR KURNIA ADI.

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB
HUKUM PARA PIHAK
(Studi kasus di PT ASTRA SEDAYA FINANCE di Surakarta)**

Abstrak

Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak (Studi Kasus Di PT. Astra Sedaya Finance Di Surakarta)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. Tujuan yang ingin dicapai penulis setelah melakukan penelitian berdasarkan permasalahan adalah: a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta; b) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penulisan melakukan penelitian yang bersifat diskriptif yaitu bersifat menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa saja dalam hal yang bersumber dari undang-undang maupun buku-buku dan yang terjadi dalam praktek fidusia sebagai jaminan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang ditinjau dari tanggung jawab para pihak. Hasil Penelitian adalah Proses dalam pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan standar operasional perusahaan, diantaranya yaitu: a) Pihak salesman dari *dealer/showroom* datang langsung ke PT. Astra Sedaya Finance Surakarta untuk menyerahkan aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur; b) Pihak *dealer/showroom* mengirim fax kepada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta, yang berisi aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur; c) Aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur diambil oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Surakarta ke *dealer/showroom* yang bersangkutan. Adapun aplikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur dalam pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka permohonan pembiayaan diajukan ke *Dealer Service Officer* (DSO) PT. Astra Sedaya Finance Surakarta untuk dilakukan proses registrasi. Kemudian data tersebut dimasukkan ke komputer yang dikenal dengan istilah QDQR (*Quick Data Quick Review*); a) Proses *Survey*; b) Proses Analisis Pembiayaan; c) Wawancara; d) Keputusan Pengajuan Kemiayaan Konsumen; e) Print Dokumen; f) Validasi Terhadap Pengajuan Pembiayaan; g) *Filling* Dokumen. Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga.

Kata Kunci: Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, Tanggung Jawab Hukum Para Pihak

Abstract

Fiduciary as a Guarantee in Financing Motor Vehicle Purchases, An Overview of the Legal Responsibilities of Parties (Case Study at PT Astra Sedaya Finance in Surakarta)", Faculty of Law, Surakarta Muhammadiyah University 2018. The objectives to be achieved by the writer after conducting research based on the problems are: a) To find

out and analyze how the construction of the agreement financing the purchase of motorized vehicles with fiduciary guarantees at PT Astra Sedaya Finance in Surakarta; b) To find out the legal responsibilities of the parties in the financing agreement for the purchase of motorized vehicles with fiduciary guarantees at PT Astra Sedaya Finance in Surakarta. The method used in this study is Normative Legal Research, namely by discussing doctrines or principles in law. Writing conducts research that is discretionary in nature, which is to explain a situation or event only in terms of those originating from laws or books and which occur in fiduciary practice as a guarantee of financing the purchase of motorized vehicles in terms of the parties' responsibilities. The results of the research are the processes in the submission of funding must be in accordance with the operational standards of the company, including: a) The salesman from the producer / showroom comes directly to PT. Astra Sedaya Finance Surakarta to submit applications and requirements that have been completed by prospective debtors; b) The dealer / showroom sends a fax to PT. c) Applications and requirements that have been completed by prospective debtors are taken by PT. Astra Sedaya Finance Jakarta to the relevant dealer / showroom. The applications and requirements that must be met by prospective debtors in the submission of motor vehicle financing. After all requirements are met, the application for filing is submitted to the Dealer Service Officer (DSO) of PT. Astra Sedaya Finance Surakarta for registration. Then the data is entered into a computer known as QDQR (Quick Data Quick Review); a) Survey Process; b) Financing Analysis Process; c) Interview; d) Decision on Submission of Consumer Financing; e) Print Documents; f) Validation of Requests for Financing; g) Document Filling. Provisions regarding the responsibility of the parties to the leasing agreement in its implementation other than binding to the parties in the agreement are also binding on the heirs who obtain rights and third parties.

Keywords: Motor Vehicle Financing, Fiduciary Guarantees, Legal Responsibilities of Parties

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini karena masyarakat sekarang sering membuat perikatan yang berasal dari perjanjian. Perjanjian ini diatur dalam suatu peraturan hukum kontrak yang berguna untuk menjadi pedoman para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1313 Bab Kedua dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) didefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang penting dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya

sebagaimana tersebut diatas, harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran.¹

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.²

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Biasanya orang meminjam uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana, guna pembiayaan kegiatan usahanya.³

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Jaminan kebendaan dapat berbentuk gadai, hipotek, hak tanggungan ataupun fidusia.⁴

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah '*kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk*

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 2.

² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 2

³ M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 1

⁴ *Ibid*, hal. 2.

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, ini hampir sama dengan pinjaman kredit yang dilakukan oleh bank. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Jaminan yang sering dipergunakan oleh perusahaan finance adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah jaminan fidusia.⁶

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa; ”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Terkait hal tersebut, permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak (Studi Kasus Di PT. Astra Sedaya Finance Di Surakarta)”**.

Tujuan yang ingin dicapai penulis setelah melakukan penelitian berdasarkan permasalahan adalah: a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi

⁵ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 50

⁶ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke- 4*, Bandung: Alfabeta, hal.140.

perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta; b) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya. Penulisan melakukan penelitian yang bersifat diskriptif yaitu bersifat menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa saja dalam hal yang bersumber dari undang-undang maupun buku-buku dan yang terjadi dalam praktek fidusia sebagai jaminan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang ditinjau dari tanggung jawab para pihak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manajer divisi pembiayaan, konstruksi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tertulis dalam perjanjian baku yang telah disepakati oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Surakarta, maka Tahapan-tahapan yang ditentukan oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta antara lain pembiayaan yang dilakukan oleh pada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta dengan costumer atau debitur hampir sama dengan kredit yang dilakukan oleh bank. Pembiayaan yang dimaksud adalah pemberian pinjaman oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta kepada debiturnya dalam jumlah tertentu untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan, yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya.

Langkah pertama yang dilakukan dalam permohonan pembiayaan adalah calon debitur datang ke *dealer/showroom* yang dikehendaki untuk membeli kendaraan bermotor, yang cara pembayarannya secara berkala atau kredit dengan menentukan PT. Astra Sedaya Finance Surakarta sebagai pihak yang akan mendanai pembiayaan kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya calon debitur mengisi formulir aplikasi dan memenuhi persyaratan pembiayaan untuk diajukan ke PT. Astra Sedaya Finance Surakarta.

Ketentuan umum yang dimaksud antara lain : Bunga pembiayaan berbeda-beda tergantung pada merk kendaraan dan status kendaraan (baru atau mobil) yang akan dilakukan pembiayaan konsumen; a) Jangka waktu pembiayaan konsumen antara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun; b) Besarnya pembiayaan disesuaikan dengan pendapatan calon debitur.

a. Syarat umum terdiri dari:

- 1) Foto copy KTP
- 2) Menikah : foto copy suami/istri pemohon
- 3) Belum menikah : foto copy KTP pemohon
- 4) Foto copy kartu keluarga

b. Surat persetujuan

c. Konsumen pribadi: surat persetujuan suami/istri

d. Konsumen perusahaan: surat persetujuan komisaris

e. Data pekerjaan

Data pekerjaan yang harus dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan pemilikan mobil, sesuai dengan profesi debitur.

f. Data jaminan

Yang menjadi jaminan dalam perjanjian disini adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Selama pembiayaan konsumen belum dilunasi oleh calon debitur, maka surat-surat kepemilikan atas motor yang dikreditkan dipegang oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka permohonan pembiayaan diajukan ke *Dealer Service Officer* (DSO) PT. Astra Sedaya Finance Surakarta untuk dilakukan proses registrasi. Kemudian data tersebut dimasukkan ke komputer yang dikenal dengan istilah QDQR (*Quick Data Quick Review*).

a. Proses *Survey*

Survey dilakukan oleh pihak *Surveyor* dari perusahaan pembiayaan dengan mendatangi rumah calon debitur atau perusahaan calon debitur (jika ada) dan *survey* ke perusahaan tempat calon debitur bekerja untuk membandingkan data yang diberikan dengan keadaan keuangan calon debitur yang sebenarnya. Pihak *Surveyor* akan mencatat semua data yang diperoleh pada catatan *Order Survey*. Selanjutnya bagian proses dokumen memasukkan data tersebut ke dalam komputer sebagai data perusahaan dan menghitung besarnya pembiayaan per bulan dengan cara perhitungan bahwa Angsuran per bulan = jumlah hutang :

jangka waktu cicilan (bulan) Perhitungan bunga yang digunakan PT. Astra Sedaya Finance Surakarta adalah Flat, yaitu besarnya bunga yang dibebankan setiap bulannya adalah tetap. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan besarnya angsuran tiap bulan.

b. Proses Analisis Pembiayaan

Bagian analisa pembiayaan ini akan menganalisa data-data calon debitur dari hasil *survey* (terutama data keuangan), dengan hasil perhitungan besarnya angsuran tiap bulan yang dibebankan kepada calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Karena yang sangat diperhatikan oleh bagian pembiayaan konsumen adalah kemampuan membayar dari calon debitur, bukan prinsip penilaian pembiayaan. Setelah selesai dianalisis, data-data calon debitur dikirim ke bagian komite pembiayaan, yaitu kepala bagian pembiayaan dengan memberikan catatan pada berkas yang berisi data-data calon debitur untuk proses lebih lanjut.

c. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan oleh kreditur untuk memperoleh informasi dari debitur dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan oleh kepala bagian pembiayaan kepada calon debitur, cukup melalui telepon. Namun apabila masih ada persyaratan yang kurang, maka wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan calon debitur.

d. Keputusan Pengajuan Kemitiaayaan Konsumen

1) Disetujui

Pembiayaan konsumen disetujui Persetujuan pembiayaan diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta dan dianggap mampu untuk membayar kewajibannya kepada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta di masa yang akan datang.

2) Ditolak

Pengajuan pembiayaan konsumen ditolak dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah data calon debitur kurang lengkap, persyaratan yang telah ditetapkan tidak dilengkapi, dan kurangnya kemampuan calon debitur untuk membayar kewajibannya. Apabila pengajuan pembiayaan ditolak, maka bagian pembiayaan akan memberitahukan langsung kepada calon debitur

melalui telepon ataupun kepada *dealer/showroom* yang bersangkutan. Semua data-data calon debitur tidak dikembalikan dikarenakan data-data yang ada pada pihak PT. Astra Sedaya Finance Surakarta hanya berupa foto copy saja.

e. Print Dokumen

Bagi calon debitur yang telah disetujui, maka semua dokumen yang diperlukan akan dibuat oleh bagian Dokumen Print. Dokumen-dokumen tersebut adalah: a) Dokumen perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia; b) Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia; c) Syarat pernyataan bersama; d) Surat kuasa; e) *Document Checklist* (dokumen yang berisi pemeriksaan atas kelengkapan data debitur); f) Perhitungan pembayaran A/P (*Account Payable*); g) Foto copy KTP debitur dan suami/istri; h) *Order survey*; i) Aplikasi; j) Pernyataan dan konfirmasi; l) Surat persetujuan suami atau istri (jika ada). Setelah semua lengkap, selanjutnya kepala bagian pembiayaan konsumen menandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk dikirim ke bagian *Filling Data*.

f. Validasi Terhadap Pengajuan Pembiayaan

Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ditentukan ketika pembiayaan yang dimaksud *cair/valid*. Dan pada saat itu juga kendaraan bermotor yang bayar sudah dapat digunakan oleh debitur.

Pada tanggal jatuh tempo ini, pihak dealer akan menagih angsuran pertama kepada debitur dengan perhitungan seperti tersebut di atas dan sisa hutang debitur akan dibayar oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta kepada dealer, sehingga untuk selanjutnya debitur harus membayar kepada perusahaan pembiayaan dengan perhitungan.

Angsuran kedua ini harus dibayar kepada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta satu bulan kemudian setelah pembayaran angsuran pertama (tanggal jatuh tempo).

g. *Filling* Dokumen

Semua dokumen yang sudah ditandatangani oleh kepala bagian pembiayaan konsumen, akan dibuat dalam 4 (empat) rangkap oleh bagian *Filling Document* yang masing-masing akan dikirim kepada debitur, notaris, kantor pusat, dan yang satu untuk disimpan di perusahaan sebagai data pelanggan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat dilakukan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta dengan *dealer* atau *Showroom* dan debitur merupakan kategori pembiayaan. Bahwa

pembiayaan merupakan bagian dari konsep perjanjian dimana terdapat para pihak yang berjanjia atau sepakat terhadap suatu hal. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

Perjanjian yang dilakukan oleh Marketing PT. Astra Sedaya Finance Surakarta dengan *dealer* dan debitur telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dimana terdapat Kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Surakarta dan Debitur dalam hal ini adalah konsumen. Para pihak sepakat untuk melakukan pembiayaan sepeda motor sebagai objek barang dan membuat perjanjian dalam bentuk kontrak, dimana isinya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya membuat suatu perjanjian, diantaranya:

- Sepakat mereka yang mengikat diri

Dalam hal ini para pihak yaitu lembaga pembiayaan sepakat untuk melakukan pembiayaan berupa kendaraan bermotor milik konsumen dalam bentuk kontrak dan surat pernyataan bersama.

- Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Sesuai dengan perjanjian diatas bahwa Viktor Uly Silitonga telah cakap untuk membuat suatu perjanjian karena telah dewasa karena telah menjadi branch manager di PT. Astra Sedaya Finance Surakarta serta Suratno yang bekerja sebagai Polisi di Kabupaten Boyolali dan selanjutnya disebut sebagai debitor dengan mengajukan syarat umum terdiri dari: Foto copy KTP, Menikah : foto copy suami/istri pemohon, Belum menikah : foto copy KTP pemohon, Foto copy kartu keluarga. Tujuan dari syarat umum ini adalah untuk mengetahui bahwa konsumen merupakan orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab.

- Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu disini adalah tentang objek barang yaitu sepeda Mobil TOYOTA ALL NEW AVANZA SILVER tahun 2015 dengan model 1300 M/T AIRBAG 1 TON MB dalam keadaan BARU.

- Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal disini adalah bahwa kesepakatan dalam bentuk kontrak pembiayaan yang disepakati oleh para pihak memberikan hak dan kewajiban masing-masing tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan salah satu pihak.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta ini didaftarkan pada Notaris yang berkedudukan sesuai wilayah kepemilikan untuk diterbitkan akta jaminan fidusia. Setelah mendapatkan akta notaris selanjutnya didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia dimaksudkan agar dana yang dipinjamkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Surakarta sebagai kreditur dan ditambahkan keuntungan-keuntungan tertentu dapat diterimanya kembali. Jaminan fidusia padapelaksanaan perjanjian pembiayaan di atas adalah mobil yang diserahkan kepada debitur secara kepercayaan oleh kreditur. Adanya jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan berarti debitur tetap menguasai barang jaminan secara fisik, yaitu mobil tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di Di PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta

Subjek pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta memiliki hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (supplier). Objek dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta adalah kendaraan motor. Kendaraan bermotor adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta merupakan perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan

membayarnya secara tunai kepada pemasok, konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

Jenis Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, pokok, tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitor), Jaminan pokok secara *fidusia*. angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (*promissory notes*) dari konsumen.

Per Ojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan *berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen* dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam hal ini perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta dilakukan secara transparan, baik terhadap promosi, maupun penjelasan kepada konsumen.

Pembagian dan pengaturan tanggung jawab oleh para pihak dalam perjanjian leasing harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPdata, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian leasing dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata

Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPdata. Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusak pada kendaraan yang dimiliki tertanggung.

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan: “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” *Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPdata menyatakan :* “ setiap orang bertanggung-jawab

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip = culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif, culpa in ommitendo*). Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara sebagai berikut: Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan: “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.

Kewajiban ganti rugi (*schade Vergoeding*) tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur setelah debitur dinyatakan lalai dan harus ada pernyataan lain yang diberikan oleh kreditur. Jika wanprestasi benar-benar berakibat kerugian yang akan diderita oleh kreditur, maka konsumen selaku debitur berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang timbul.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama

baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta

Bahwa perjanjian pembiayaan antara PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta dengan pihak dealer sebagai kreditur dengan debitur merupakan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian dibuat secara tertulis dan merupakan perjanjian baku yang telah didaftarkan pada Notaris yang berkedudukan sesuai wilayah kepemilikan untuk diterbitkan akta jaminan fidusia yang isinya adalah bahwa PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta (pihak pertama) membiayai pihak kedua dalam pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dan obyek jaminannya adalah mobil TOYOTA ALL NEW AVANZA yang dibeli dengan pembiayaan itu.

- 2) Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di Di PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta

Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta dengan pihak dealer sebagai kreditur dengan debitur, kreditur berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen, informasi fasilitas pembiayaan, jaminan keamanan, pelayanan yang akurat, dan penyelesaian penanganan pengaduan debitur. Sedangkan kewajiban debitur adalah melunasi dan membayar dengan cara angsuran dan memelihara dan mengurus barang sebaik-baiknya.

Berdasarkan perspektif hukum Islam menjelaskan hukum pembiayaan ini berdasarkan literatur fiqh kontemporer, bai' taqsih (jual beli kredit) ini didefinisikan sebagai berikut: "Bai' taqsih adalah praktik jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati. Sementara itu, penjual menyerahkan barang dagangan (bidla'ah) yang dijualnya kepada pembeli seketika itu juga pada waktu terjadinya aqad. Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga untuk barang yang dibeli dalam bentuk cicilan berjangka. Disebut dengan istilah bai' taqsih adalah karena memuatnya ia kepada

sebuah bentuk transaksi jual beli dengan ciri harga yang disepakati: a) sama dengan harga pasar, atau b) lebih tinggi dari harga pasar, atau sebaliknya; c) lebih rendah dari harga pasar. Akan tetapi yang umum berlaku adalah pada umumnya harga dari barang bai' taqsîth adalah lebih tinggi dibanding harga jual pasar.”⁷

4.2 Saran

Diharapkan kedepannya, lembaga pembiayaan maupun konsumen dalam asuransinya menjelaskan mengenai premi yang harus dibayarkan setiap bulan. Diharapkan kedepannya para pihak baik lembaga pembiayaan maupun konsumen dalam melengkapi syarat administrasi benar-benar sesuai dengan identitas yang dimiliki, sehingga pihak lembaga pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya tidak mengalami kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadli Muhammad Taqi al-Utsmâny, *Ahkamu al Bai' al-Taqsîth dalam Majalah Majma' al-Fiqhu al-Islamy*, tt, Juz 7
- Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty
- M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke- 4*, Bandung: Alfabeta
- KUHPerdata
- Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Per Ojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

⁷ Al-Qadli Muhammad Taqi al-Utsmâny, *Ahkamu al Bai' al-Taqsîth dalam Majalah Majma' al-Fiqhu al-Islamy*, tt, Juz 7, hal. 596